
01 Evaluasi Sistem Zonasi Untuk Keadilan Penerimaan Siswa Baru

Yusuf Bachtiar¹, Memei Sri Mulyani¹, dan Nurnissa Maharani¹

yusufbachtiar@upi.edu

PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, KAMPUS PURWAKARTA, INDONESIA

Abstract- Education in Indonesia is not evenly distributed, then the government makes a policy for schools to accept 90% of the quota for students who come from close by. But in practice, many things have been criticized and opposed by the community, even parents and students themselves. A little example is when a student wants to get a school with complete facilities but he is forced to go to a school near his house whose facilities are not complete, this will be a problem. The expected goal is to demand justice for students to get the same school facilities even though they are not favorite schools. The solution that can be done is an evaluation of the policy, which is reduced from 90% because it is too large, and before that the government should level the school facilities first before leveling the students. The method used is reviewing and collecting data from existing journals which are then reviewed and collected. The conclusion that can be accepted is that the zoning system policy needs evaluation, even though the goal is good but in practice it has not achieved this goal so it must be improved.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Dalam era globalisasi dewasa ini terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dihindarkan dari globalisasi yang telah memasuki setiap jengkal kehidupan manusia modern. [1]

Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dengan sistem zonasi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima.

Permasalahannya adalah pada pelaksanaan sistem penerimaan siswa zonasi ini memiliki banyak pro dan kontra, tentunya kami sebagai mahasiswa ingin ikut serta dalam perkembangan Pendidikan di Indonesia. Dan salah satunya adalah sistem zonasi ini, karena untuk mencapai target dari sistem zonasi itu sendiri yang dimana ingin meratakan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itulah maka kami membuat ini untuk dapat digunakan sebagai fasilitator kepada Kemendikbud agar bias melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi ini. Kita semua harus bersama sama bergerak dan berusaha untuk mewujudkan pendidikan nasional yang baik.

Nama Seminar:

1st National Conference on Education, System and Technology Information

Tema Seminar:

“Entering 5.0 era: IST enhancement for society well-being”

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Sistem pendidikan nasional yang demokratis bukan berarti menolak kenyataan adanya perbedaan di dalam tingkat-tingkat kecerdasan manusia sebagai karunia Ilahi. Sistem pendidikan demokratis adalah memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. [2]

2. Metode

Metode yang digunakan adalah kolaborasi antara metode-metode, yaitu diantaranya adalah Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu apakah sistem zonasi ini sudah baik. Adapun jenis penelitian kuantitatif yang akan digunakan adalah jenis penelitian survey dimana dilakukan dengan menggunakan google formulir yang disebarakan kepada mahasiswa UPI Kampus Purwakarta. Dalam penelitian ini terdapat kutipan dari jurnal-jurnal yang telah kami baca dan pahami sehingga data yang ada adalah data yang valid. Terdapat pula pendapat para ahli yang digunakan sebagai tambahan referensi. Dan juga review jurnal-jurnal yang terdapat di Google Scholar guna mendukung dan menguatkan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pendidikan dalam arti yang luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. [3]

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan baik untuk kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak, yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Secara umum pendidikan adalah pengaruh, bantuan atau tuntutan yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak didik [4]

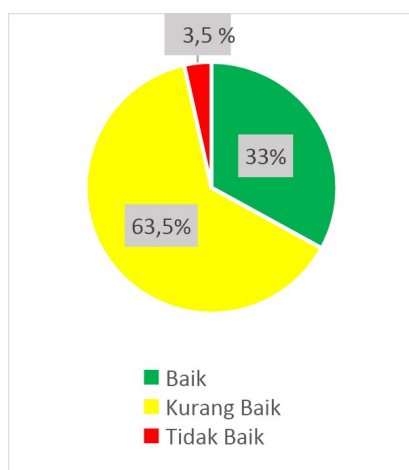
Pendidikan di Indonesia memiliki banyak sisi, yang baik buruk dan cukup menarik. Salah satu diantaranya adalah adanya sekolah favorit yang memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang lebih baik dari sekolah lainnya. Sehingga membuat siswa ingin bersekolah di sekolah favorit, bahkan orang tua siswa tersebut mendukung dan ada beberapa orang tua yang cenderung memaksakan anaknya untuk bersekolah di sekolah favorit tersebut. Inilah yang dilihat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sistem penerimaan siswa baru yang bertujuan untuk meratakan penyebaran siswa di sekolah-sekolah.

3.2. SISTEM ZONASI

SISTEM ZONASI

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. [5]

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan melalui sistem zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Pemerintah memiliki target bahwa pemerataan tidak hanya untuk akses pada pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas pendidikan. Muhadjir Effendy juga menambahkan sistem zonasi adalah salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Diharapkan dengan adanya implementasi sistem zonasi ini permasalahan dalam pemerataan kualitas pendidikan dapat terselesaikan. (Dikutip dalam media berita edukasi.kompas. 5 Juni 2018)



Gambar 1. Diagram hasil survei

Survei ini dilakukan melalui google formulir yang dilakukan selama 5 hari, kami mendapatkan 85 responders. Salah satu pertanyaan yang kami ajukan adalah “Apakah sistem zonasi sudah berjalan dengan baik?” Dari 85 orang tersebut 28 orang (33%) diantaranya menjawab sudah baik, tapi ada 54 orang, (63.5%) menjawab jika sistem zonasi berjalan kurang baik. Sedangkan 3 orang (3.5%) menjawab jika sistem zonasi ini tidak baik.

Melihat dari hasil pengamatan yang kami lakukan juga mencari sebab dari sumber-sumber jurnal yang ada, kami telah menemukan jika ada sebuah alasan yang merupakan faktor terbesar mengapa sistem zonasi berjalan kurang baik. Sekolah-sekolah di Indonesia belum merata, fasilitas dan sarana prasarana

Nama Seminar:
 1st National Conference on Education, System and Technology Information
 Tema Seminar:
 “Entering 5.0 era: IST enhancement for society well-being”

sekolah di Indonesia belum merata, dan bahkan banyak sekolah yang rusak dan tidak layak untuk digunakan.

Tabel 1. Data ruang kelas sebagian kota di Jawa Barat

12/5/2020 :: Neraca Pendidikan Daerah ::

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Propinsi	Persentase Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%)	SD (Baik)	SD (Baik) %	SD (Rusak Ringan)	SD (Rusak Ringan) %	SD (Rusak Sedang)	SD (Rusak Sedang) %	SD (Rusak Berat)
35	026900	Kota Banjar	Prov. Jawa Barat	12.28	188	28.02	301	44.86	102	15.20	80
33	026700	Kota Cimahi	Prov. Jawa Barat	13.12	520	41.34	621	49.36	62	4.93	55
29	026200	Kota Sukabumi	Prov. Jawa Barat	9.74	396	34.59	687	60.00	46	4.02	16
30	026300	Kota Cirebon	Prov. Jawa Barat	16.39	315	25.10	750	59.76	76	6.06	114
26	022500	Kab. Pangandaran	Prov. Jawa Barat	13.21	348	19.66	782	44.18	246	13.90	391
34	026800	Kota Tasikmalaya	Prov. Jawa Barat	16.35	496	25.32	1188	60.64	157	8.01	118
28	026100	Kota Bogor	Prov. Jawa Barat	15.90	892	33.15	1642	61.02	122	4.53	35
18	021600	Kab. Majalengka	Prov. Jawa Barat	0.00	1534	33.52	1809	39.53	737	16.11	496
22	022000	Kab. Purwakarta	Prov. Jawa Barat	14.07	572	19.08	1949	65.01	333	11.11	144
13	021000	Kab. Sumedang	Prov. Jawa Barat	16.61	571	14.17	2047	50.79	994	24.67	418
17	021500	Kab. Kuningan	Prov. Jawa Barat	13.41	645	14.63	2354	53.40	689	15.63	713
32	026600	Kota Depok	Prov. Jawa Barat	18.17	1617	37.77	2387	55.76	132	3.08	134
25	022300	Kab. Bandung Barat	Prov. Jawa Barat	12.59	786	16.14	2575	52.89	680	13.97	828
16	021400	Kab. Ciamis	Prov. Jawa Barat	15.09	852	18.33	2659	57.20	528	11.36	610
27	026000	Kota Bandung	Prov. Jawa Barat	24.08	1885	34.48	2986	54.62	308	5.63	280

Ini merupakan data dari Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [6] terlihat jika masih ada tidak sedikit ruang kelas yang masih rusak. Ini tentunya menjadi sebuah hambatan bagi siswa dalam belajar, bagaimana siswa dapat belajar dengan baik jika ruang kelasnya tidak mendukung.

3.3 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Kelebihan yang dapat dilihat adalah tersebarnya siswa dan siswa dalam sekolah sekolah, siswa dapat memiliki sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya agar dapat memangkas waktu perjalanan berangkat sekolah, ini agar siswa tidak ada yang terlambat masuk sekolah. Dengan adanya sistem zonasi ini pula maka sekolah yang dulunya hanya terpendang sekolah biasa atau bukan sekolah favorit memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Sekolah yang memiliki siswa yang berprestasi tentunya akan memberikan semangat dan motivasi agar teman-teman yang lain juga dapat melakukan hal yang sama.

Kekurangan sistem zonasi ini terlihat jelas pada pelaksanaan di daerah-daerah yang sekolahnya belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang merata ini sungguh tidak adil. Tentunya semua siswa ingin bersekolah di sekolah yang baik, menerima fasilitas yang baik, mendapat guru yang baik, jika siswa tersebut terpaksa untuk bersekolah di lingkungan yang kurang baik maka itu akan menjadi penghambat siswa tersebut untuk maju dan berkembang.

Perlu diketahui, jika melihat kecenderungan saat ini, dunia pendidikan Indonesia mengalami perubahan perubahan yang sangat cepat dan bersifat global. Hal itu diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Revolusi informasi telah mengakibatkan dunia menjadi semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis, administratif-yuridis, politis, dan sosial budaya [7] oleh karena itu maka sekolah-sekolah harus memiliki fasilitas teknologi yang baik untuk dapat menunjang siswanya dalam belajar dan berkembang di zaman sekarang.

Paradigma sistem pendidikan nasional seharusnya mencakup berbagai faktor diantaranya input, proses dan output pendidikan. Output pendidikan merupakan fokus dari ikhtiar pendidikan, dan input menjadi masukan yang penting bagi output, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menggunakan input tersebut yang terkait dengan individu-individu dan sumber-sumber lain yang ada di sekolah. Faktor proses itulah yang menentukan output pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, masalah semacam kurikulum yang efektif dan menyenangkan serta manajemen yang menjadi sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah [8]

Selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia sekolah, baik kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga dituntut menciptakan lingkungan kondusif bagi pembelajaran. Pada kenyataannya, baru 49% guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. Angka ini menunjukkan masih belum tercapainya standar kualitas yang diharapkan di setiap sekolah[9]

DAMPAK LAIN DARI SISTEM ZONASI

Ombudsman RI menyebut terjadi praktik uang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah. Ombudsman meminta pihak sekolah mengembalikan 'uang curang' yang diterima dari calon murid.(Anggota Ombudsman Ahmad Suadi di Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019))

Orangtua ingin anaknya bersekolah di sekolah yang terbaik hingga menghalalkan segala cara agar dapat melakukan hal ini. Ini tidak akan terjadi jika seluruh sekolah memiliki fasilitas yang sama. Tidak ada perbedaan sarana prasarana. Sehingga tidak ada lagi julukan sekolah favorit yang ada adalah semua sekolah itu favorit.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa tiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ujung tombak pelaksanaan UUD 1945 tersebut adalah di daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Nama Seminar:

1st National Conference on Education, System and Technology Information

Tema Seminar:

“Entering 5.0 era: IST enhancement for society well-being”

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan dasar dan menengah telah diserahkan ke daerah. [10]

Gallagher (1991) dan Rimm (1997), menemukan ada 2 faktor yang menyebabkan kurang prestasi ini: faktor lingkungan (sekolah) dan faktor personal (keluarga). Faktor-faktor lingkungan muncul dari sekolah dan teman sebaya. Sekolah yang tidak mendukung iklim intelektual, berfokus pada atletik dan status sosial semata dapat berkontribusi pada kurang prestasi (Rimm, 1995). Pengaruh rekan sebaya juga menjadi signifikan yang memaksa murid potensial menghalangi prestasinya (Reis & McCoach, 2000). Bernd (1999) mengutip sebuah penelitian yang mengukur nilai dan perilaku murid menemukan bahwa murid semakin mirip dengan teman-temannya pada penghujung tahun ajaran, dibandingkan ketika pertama kali masuk sekolah. Murid yang berprestasi cenderung menurun prestasinya jika berteman dengan murid yang berprestasi buruk. Oleh karena itu, untuk mendukung prestasi peserta didik, maka faktor lingkungan dan personal diatas perlu dikelola dengan baik.

4. Simpulan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dengan sistem zonasi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Permasalahannya adalah pada pelaksanaan sistem penerimaan siswa zonasi ini memiliki banyak pro dan kontra, tentunya kami sebagai mahasiswa ingin ikut serta dalam perkembangan Pendidikan di Indonesia. Dan salah satunya adalah sistem zonasi ini, karena untuk mencapai target dari sistem zonasi itu sendiri yang dimana ingin meratakan pendidikan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah kolaborasi antara metode-metode, yaitu diantaranya adalah Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu apakah sistem zonasi ini sudah baik.

Pendidikan di Indonesia, Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan di Indonesia memiliki banyak sisi, yang baik buruk dan cukup menarik. Salah satu diantaranya adalah adanya sekolah favorit yang memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang lebih baik dari sekolah lainnya.

Sistem zonasi, Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Kelebihan yang dapat dilihat adalah tersebarannya siswa dan siswa dalam sekolah sekolah, siswa dapat memiliki sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya agar dapat memangkas waktu perjalanan berangkat sekolah, ini agar siswa tidak ada yang terlambat masuk sekolah. Dengan adanya sistem zonasi ini pula maka sekolah yang dulunya hanya terpendang sekolah biasa atau bukan sekolah favorit memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi.

Kekurangan sistem zonasi ini terlihat jelas pada pelaksanaan di daerah-daerah yang sekolahnya belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang merata ini sungguh tidak adil.

Ombudsman RI menyebut terjadi praktik uang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah. Ombudsman meminta pihak sekolah mengembalikan 'uang curang' yang diterima dari calon murid. (Anggota Ombudsman Ahmad Suadi di Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019))

5. Referensi

- [1]. H.A.R Tilaar (1), *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003
- [2]. H.A.R Tilaar (1), *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003
- [3]. Soegarda Poerbakawtja, *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- [4] Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- [5] Widodo, S., Abdulmajid, N. W., Sari, D. P., & Hikmawan, R. Kebiasaan Berpikir Matematis dan Kemampuan Koneksi Matematika Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa PSTI). *INTEGRATED (Journal of Information Technology and Vocational Education)*, 1(2), 14-18.
- [6]. Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019
- [7]. Nana Syaodih, Ayi Novi Jami'at, Ahman, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- [8.] Imam Wahyudi, *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif Dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012.

Nama Seminar:

1st National Conference on Education, System and Technology Information

Tema Seminar:

“Entering 5.0 era: IST enhancement for society well-being”

[9]. Elga Andina, Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik, 2017

[10]. H.A.R. Tilaar (2), Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis, Rineka Cipta, Jakarta, 2006

[11]. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Jakarta, 2012

[12]. Anwar Arifin, Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta